

Eksistensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Tengah Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Pada PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia di Provinsi Bali)

Ni Made Sukarmiasih*, Anantawikrama Tungga Atmadja, Gede Adi Yuniarta

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*adek300591@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
22 Agustus 2024

Tanggal diterima:
27 Desember 2024

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2024

Kata kunci: sistem informasi manajemen; revolusi industri 4.0; digitalisasi perbankan; bank perkreditan rakyat

Pengutipan:

Sukarmiasih, N. M., Atmadja, A. T., & Yuniarta, G. A. (2024). Eksistensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Tengah Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus pada PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia di Provinsi Bali). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14 (3), 473-484

Keywords: *management information system; industrial revolution 4.0; banking digitalization; rural credit bank*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi latar belakang ketidakefektifan penerapan sistem informasi manajemen (SIM) digital di BPR KAS Indonesia, serta menilai dampak dan efek dari sistem tersebut terhadap PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) meskipun BPR KAS Indonesia telah mengimplementasikan SIM digital, sistem tersebut belum sepenuhnya transparan dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan internal perusahaan; (2) BPR KAS Indonesia secara umum belum mengoptimalkan penerapan SIM digital disebabkan oleh peraturan POJK No. 12/POJK.03.2016, populasi nasabah yang tidak seluruhnya merupakan generasi milenial, serta pertimbangan kesiapan infrastruktur dan portofolio investasi, dengan prioritas utama pada kesehatan keuangan dan kinerja bisnis setelah pandemi Covid-19; (3) langkah-langkah penerapan SIM digital mencakup persiapan pola pikir digital, penyusunan peta cetak biru digitalisasi, analisis SWOT, edukasi kepada pelanggan tentang pemanfaatan digitalisasi, dan dasar untuk pengambilan keputusan; (4) Dampak dan implikasi digitalisasi SIM mencakup perubahan dalam metode transaksi nasabah, pola pikir, cara kerja, serta model bisnis BPR KAS Indonesia yang mempermudah pengambilan keputusan, mengurangi risiko bisnis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, serta potensi munculnya fintech yang bisa menjadi tantangan atau peluang bagi BPR KAS Indonesia.

Abstract

This research aims to evaluate the background to the non-optimal implementation of the digital management information system (SIM) at BPR KAS Indonesia, as well as assessing the impact and effects of the system on PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia. The research results show that (1) although BPR KAS Indonesia has implemented a digital SIM, the system is not fully transparent and does not fully meet the company's internal needs; (2) BPR KAS Indonesia in general has not optimized the implementation of digital SIMs due to POJK regulation no. 12/POJK.03.2016, the customer population is not all of the millennial generation, as well as considerations of infrastructure and investment portfolio readiness, with the main priority being financial health and business performance after the Covid-19 pandemic; (3) steps for implementing a digital SIM include preparing a digital mindset, preparing a digitalization blueprint map, SWOT analysis, educating customers about the use of digitalization, and the basis for decision making; (4) The impact and implications of SIM digitization include changes in customer transaction methods, mindsets, ways of working, and the Indonesian BPR KAS business model which makes decision making easier, reduces business risks, increases operational effectiveness and efficiency, as well as the potential for the emergence of fintech which could be a challenge or opportunities for BPR KAS Indonesia.

Pendahuluan

Menurut Hamdan (2018), Revolusi Industri 4.0 adalah kemajuan teknologi terbaru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis, serta secara signifikan mengubah cara masyarakat beroperasi dan hidup. Ciri utama dari Revolusi Industri 4.0 adalah penerapan sistem otomatis atau digital yang dapat menghubungkan berbagai proses aktivitas manusia. Kemajuan teknologi, khususnya dalam layanan teknologi, telekomunikasi, dan internet, telah meningkat pesat di era Revolusi 4.0, memungkinkan konektivitas global yang tidak hanya mencakup masyarakat di seluruh dunia tetapi juga seluruh transaksi online. Di Indonesia, penggunaan teknologi digital memiliki potensi yang sangat besar, dan kemajuan serta kesuksesan perusahaan sangat bergantung pada seberapa cepat mereka dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi, sehingga membuat operasi bisnis menjadi lebih efisien dan mudah. Salah satu contoh nyata adalah sektor ritel yang telah berkembang menjadi e-commerce melalui pemanfaatan teknologi dan internet.

Fintech atau teknologi keuangan merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi, memberikan alternatif bagi masyarakat di luar lembaga keuangan tradisional. (Risna Kartika, 2020). Fintech hadir sebagai solusi alternatif yang berkembang dari kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan, serta gaya hidup yang menuntut kemudahan, kecepatan, efisiensi dan aksesibilitas dimana saja, kapan saja. Transaksi Fintech sangat mudah dan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, dan software lainnya. Pemanfaatan teknologi finansial mencakup berbagai aspek, seperti sistem pembayaran, dukungan pasar, investasi dan manajemen risiko, peminjaman, pembiayaan, penyediaan modal, dan layanan keuangan lainnya. Teknologi keuangan saat ini berkembang pesat dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena menyediakan teknologi keuangan yang efektif dan efisien.

Menurut Asaniyah (2017), digitalisasi dapat diartikan sebagai "proses menggantikan media cetak dengan bentuk elektronik". Deegan dan Tanner (2002) yang dikutip oleh Mustofa (2020) menjelaskan bahwa "digitalisasi adalah proses mengubah berbagai jenis dokumen cetak atau bentuk lainnya menjadi format digital". Inovasi dalam sektor keuangan serta integrasi teknologi digital dalam perbankan tidak hanya menarik minat kaum milenial, tetapi juga berbagai kelompok usia, termasuk masyarakat umum, karyawan, pelaku UMKM, hingga pengusaha besar. Selama pandemi Covid-19 yang melanda dunia, kehadiran teknologi digital di sektor perbankan menjadi sangat penting bagi kelancaran perekonomian. Kolaborasi antara sektor keuangan dan teknologi digital ini mempermudah nasabah dan calon nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Mereka tidak perlu lagi mengunjungi kantor bank untuk membuka rekening, menyetor, menarik dana, melakukan transfer, atau membayar, sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat, praktis, efektif, dan efisien.

Berpedoman pada POJK Nomor 62/POJK.03/2020 mengenai Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga perbankan yang menjalankan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang dikenal sebagai BPRS, dan tidak menawarkan layanan terkait lalu lintas pembayaran dalam operasionalnya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki ruang lingkup kegiatan usaha yang lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum, karena tidak diperbolehkan untuk menerima simpanan dalam bentuk giro, valuta asing, atau asuransi. Selain kendala ruang lingkup usaha, BPR, yang sering disebut sebagai "Bank Sahabat Anak Negeri," juga sering menghadapi tantangan terkait regulasi. Sebagai contoh, BPR harus mematuhi Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Persyaratan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti, yang mewajibkan BPR untuk memiliki modal inti sebesar Rp 3 miliar pada tahun 2020 dan Rp 6 miliar pada tahun 2024. Selain itu, terdapat regulasi lain yang mempengaruhi BPR, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 mengenai Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR, yang antara lain menetapkan bahwa BPR yang ingin melaksanakan digitalisasi bank harus memiliki modal inti minimal Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) atau termasuk dalam kategori Bank Perkreditan Rakyat Kegiatan Usaha 3 (BPRKU3).

Penelitian yang dilakukan oleh Kholis (2018) mengungkapkan bahwa sektor perbankan perlu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah dalam layanan perbankan. Sejak 2015, kemajuan dalam Financial Technology, atau yang sering disebut FinTech, mengharuskan perbankan untuk tetap waspada terhadap perubahan ini agar tidak kehilangan pelanggan yang mungkin berpindah ke institusi keuangan lainnya. Namun, proses digitalisasi dalam perbankan juga menghadapi berbagai tantangan. S.V. Mohana Sujana (2018) mencatat beberapa kekurangan terkait digitalisasi perbankan, sebagai berikut.

“Personal interactions between bank officials and customers have diminished due to the ability to access services from a single location. With everything being mobilized, security for protecting transactions has decreased, leading to a rise in transaction-related issues. The risk of conducting transactions is heightened due to difficulties in detecting theft involving encrypted software”

Analisis SWOT diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an saat ia memulai sebuah penelitian di *Stanford Research Institute*. Sejak itu, metode analisis SWOT telah digunakan oleh para pengusaha untuk memperkuat dan mengembangkan perusahaan mereka. SWOT merupakan teknik analisa yang dipakai untuk mengetahui keadaan perusahaan/organisasi secara lebih komprehensif baik dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari suatu usaha/organisasi baik yang berorientasi pada laba (*profit*) maupun yang *non profit*. SWOT melibatkan empat elemen utama, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Proses penyusunan strategi dalam analisis SWOT dilakukan melalui tiga tahap: pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Penerapan dari analisis SWOT pada suatu perusahaan/organisasi adalah untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai kondisi internal dan eksternal dari perusahaan, sehingga perusahaan mampu menetapkan fokus dari tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di provinsi Bali yang dipimpin oleh seorang CEO muda yang tengah berkembang dan mengedepankan generasi milenial dalam operasionalnya. Generasi muda, mulai dari milenial hingga generasi Z, sangat erat kaitannya dengan digitalisasi yang dianggap lebih praktis dan efisien. Oleh karena itu, digitalisasi dalam sektor perbankan, termasuk di BPR, menjadi sebuah keharusan. Namun, banyak BPR yang belum menerapkan sistem informasi manajemen digital secara optimal, termasuk PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Artha Sejahtera Indonesia, yang selanjutnya disebut PT. BPR KAS Indonesia. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi latar belakang dan alasan mengapa PT. BPR KAS Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi manajemen digital, meskipun dalam era revolusi industri 4.0, digitalisasi sangat penting untuk pengembangan bisnis. Dengan memahami latar belakang keterbatasan penerapan SIM digital, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya di PT. BPR KAS Indonesia. Selanjutnya, analisis SWOT akan dilakukan untuk mengetahui prosedur dan langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan sebelum manajemen BPR memutuskan penerapan SIM digital. Pembahasan ini akan mengungkapkan dampak dari kurangnya penerapan SIM digital pada eksistensi PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia.

Metode

Desain penelitian ini berdasarkan pada jenis, sifat dan tujuannya, pendekatan yang digunakan Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk mengungkap fakta mengenai keadaan sekelompok orang, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa yang terjadi saat ini dengan interpretasi yang akurat (Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002). Penelitian ini dilaksanakan di PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia yang merupakan salah satu BPR berkembang yang ada di provinsi Bali, memiliki fokus segmen pasar pada kaum milenial yang identik dengan penggunaan sistem digitalisasi dalam bertransaksi keuangan, memiliki sumber daya

manusia/ karyawan yang cukup berkualitas dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, serta memiliki dukungan penuh dari para *stakeholder* dan manajemen. Objek penelitian ini adalah data-data hasil wawancara dengan informan yang terkait dengan latar belakang belum diterapkannya SIM perbankan yang terdigitalisasi secara maksimal pada BPR KAS Indonesia di provinsi Bali, data-data terkait kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang, dan tantangan (analisis SWOT), pertimbangan belum diterapkannya digitalisasi perbankan secara penuh, data-data yang dapat menunjukkan implikasi dan dampak dari adanya SIM perbankan yang terdigitalisasi seperti laporan keuangan, buku kunjungan/buku tamu dari PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia, data-data terkait regulasi yang mengatur jalannya kegiatan usaha BPR serta data-data lainnya yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung.

Informan pada penelitian ini terdiri dari para pemegang saham yang aktif dalam kegiatan operasional BPR KAS Indonesia, pengurus dan manajemen BPR KAS Indonesia, perwakilan dari lembaga PERBARINDO Bali dan salah satu perwakilan OJK Bali yang mengetahui tentang regulasi aturan bisnis BPR. Penunjukkan informan tersebut diawali dengan memilih informan kunci yaitu Direktur Utama BPR KAS Indonesia selaku pemegang saham yang aktif dalam kegiatan operasional BPR KAS Indonesia. Informan berikutnya yaitu merupakan informan pendukung yang terdiri dari pengurus dan manajemen BPR KAS Indonesia, salah satu perwakilan PERBARINDO dan OJK Bali yang mengetahui aturan regulasi bisnis BPR. Pemilihan informan ini dilakukan dengan teknik *purposive* sampling yaitu informan yang dipilih berdasarkan kemampuannya dalam memberikan penjelasan dan pemaparan yang berkaitan dengan perkembangan, kondisi dan keberlangsungan dari usaha BPR KAS Indonesia serta informan yang memiliki kemampuan dan pemahaman tentang aturan regulasi yang berlaku pada organisasi BPR.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu diantaranya menggunakan metode wawancara untuk mengetahui lebih mendalam informasi terkait fenomena-fenomena yang akan diteliti oleh peneliti melalui wawancara mendalam kepada calon informan/responden. Metode observasi memiliki ciri yang spesifik yaitu melihat langsung kondisi lapangan seperti kondisi kantor BPR KAS Indonesia di provinsi Bali, kondisi ruangan kerja dan kondisi keuangan BPR dan sebagainya. Studi dokumen yang dijadikan sebagai data untuk memperoleh informasi tambahan yaitu berupa laporan keuangan BPR KAS Indonesia, panduan pelaksanaan kegiatan operasional, laporan rencana bisnis bank BPR KAS Indonesia, berbagai bentuk aplikasi/ formulir yang digunakan oleh BPR KAS Indonesia serta peraturan dan perundangan dari regulasi terkait yang mengatur jalannya bisnis BPR.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi disajikan dalam format naratif yang terstruktur, mencakup kesatuan bentuk, keteraturan, pola penjelasan, makna konfigurasi, dan hubungan sebab-akibat. Sementara itu, data yang dikumpulkan dari studi dokumentasi disajikan dalam format tabel untuk mempermudah analisis. Pengurangan data dilakukan dengan menyaring jawaban yang tidak relevan dengan pedoman wawancara dan memilih informasi yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Proses ini dilakukan beberapa kali untuk memastikan validitas hasil wawancara dan observasi, serta untuk memastikan bahwa hasil penelitian secara emik memadai, dengan mempertimbangkan keakuratan dan kelengkapan data dalam membangun narasi.

Hasil dan Pembahasan

Awal mula pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial Belanda pada abad ke-19, ketika didirikan berbagai lembaga seperti Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa. Lembaga-lembaga ini biasanya beroperasi di dekat komunitas desa, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil. Sesuai dengan UU No. 7/1992 tentang Perbankan, lembaga keuangan non-bank yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan memiliki kesempatan untuk bertransformasi menjadi bank. Penelitian ini berfokus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Karya Artha Sejahtera Indonesia (BPR KAS Indonesia), yang merupakan hasil akuisisi dari PT. BPR Kapal Basak Pursada.

Latar Belakang PT. BPR KAS Indonesia Belum Menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terdigitalisasi secara Maksimal

BPR KAS Indonesia sendiri sudah mulai menerapkan SIM yang terdigitalisasi namun belum mampu menerapkan secara maksimal. SIM terdigitalisasi tersebut baru diterapkan untuk kepentingan internal perusahaan, sedangkan untuk layanan jasa keuangan kepada pihak eksternal (nasabah ataupun calon nasabah) belum mampu maksimal diterapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh I Gusti Gede Dharmanta selaku Direktur BPR KAS Indonesia sebagai berikut:

“Jika dilihat dari aturan POJK yang berlaku saat ini BPR KAS Indonesia yang memiliki modal sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) memang belum memungkinkan untuk melakukan transaksi digital. Namun, BPR KAS Indonesia secara standar sudah menerapkan sistem *core banking* dalam kegiatan operasionalnya dan sejak tahun lalu sudah mulai mengembangkan SIM terdigitalisasi khusus untuk internal perusahaan guna dapat mempercepat proses operasional perusahaan seperti misalnya pada proses pengajuan kredit dan ataupun proses pembukaan penempatan dana yang prosesnya dulu mengisi manual *form* pembukaan rekening dengan tulis tangan, saat ini sudah mulai diinput oleh marketing melalui link *website* BPR KAS yang juga bisa diakses langsung oleh tim operasional di kantor”.

Faktor pertimbangan lain yang menjadi latar belakang ataupun hambatan dari belum maksimalnya penerapan SIM terdigitalisasi pada PT. BPR KAS Indonesia seperti yang disampaikan kembali oleh Rio Christian, Direktur Utama BPR KAS Indonesia sebagai berikut:

“Permodalan memang bukan menjadi satu-satunya alasan untuk bisa melakukan penerapan SIM terdigitalisasi, tapi yang akan menjadi masalah saat ini adalah pertama ketersediaan SDM yang mengerti akan proses digital. Tidak semua SDM memahami tentang proses digital, sementara di satu sisi SDM yang memahami proses digitalisasi menjadi rebutan terutama bagi perusahaan *startup* dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya yang banyak muncul saat ini. Kedua yaitu *mindset* digital, dimana saat ini tidak semua manajemen BPR atau *top leader* nya memiliki *mindset* digital karena berbicara digitalisasi yang sangat luas terkadang manajemen BPR yang sudah senior bingung memulai digitalisasi tersebut darimana atau bisa dikatakan bayangan digitalisasi tersebut masih gelap. Sehingga sangat penting untuk mengerti dan memahami apa itu *blueprint* atau peta digitalisasi. BPR KAS sendiri sudah mulai merancang aplikasi *apps* (BPR KAS *apps*) untuk proses digitalisasi pengajuan kredit, pembukaan deposito, pembukaan tabungan dan sekali lagi digitalisasi tersebut di luar transaksi digital berupa *electronic banking*. Dapat saya katakan juga *electronic banking* tersebut merupakan sebagian kecil dari digitalisasi”. Ketiga yaitu bagaimana mampu menciptakan digitalisasi dengan biaya yang efektif. Jadi dalam berbicara digitalisasi kita tidak bisa berbicara tentang biaya minimal ataupun digitalisasi mahal, tapi bagaimana kita bisa memahami dahulu *blueprint* atau peta digitalisasi yang akan dilakukan dengan cara membuat pondasi yang kuat di awal bukan hanya sekedar ikut-ikutan melakukan digitalisasi. Perencanaan yang matang di awal merupakan hal yang sangat penting agar digitalisasi yang diharapkan dapat terus berlanjut dan biaya digitalisasi menjadi efektif”.

Berdasarkan pada kedua pendapat tersebut dapat diketahui bahwa saat ini BPR KAS Indonesia belum mampu menerapkan SIM terdigitalisasi secara maksimal khususnya dalam memberikan layanan jasa keuangan berupa transfer dan *electronic banking* karena adanya benturan dengan regulasi terkait dengan permodalan yang dimiliki. Latar belakang lain dari belum diterapkannya SIM terdigitalisasi diantaranya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, kondisi dan kinerja keuangan serta tidak semua generasi nasabah menginginkan transaksi yang serba digital. Apabila BPR ingin memberikan layanan terdigitalisasi dan terbentur oleh belum tercukupinya modal inti, maka BPR dapat melakukan langkah-langkah seperti penambahan modal inti melalui RPUS, mencari investor baru untuk penguatan modal, akuisisi, merger dan ataupun konsolidasi.

Langkah-Langkah atau Prosedur Menuju Penerapan SIM Terdigitalisasi pada PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia

Sistem informasi merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sangat bermanfaat dalam menunjang aktivitas sebuah perusahaan diantaranya bermanfaat bagi manajemen dalam hal pengambilan keputusan, operasional perusahaan, serta fungsi-fungsi strategis lainnya yang bersifat kompetitif dalam suatu perusahaan. Rancangan sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan juga akan mempermudah manajemen perusahaan dalam mengelola data, transaksi dan kegiatan yang lainnya, (Nasution et al., 2022).

Pada tahun 2013, Emirate NBD mengeluarkan strategi berjangka mengenai transformasi digital yang dimulai dengan cara membentuk tim transformasi *multichannel* yang berisikan golongan anak muda berbakat. Selanjutnya menyusun *blueprint* menjadi enam pilar yaitu meningkatkan layanan servis dan penjualan dengan penggunaan *digital touch poin*, mengoptimalkan keberadaan kantor dan pusat untuk kontak dengan nasabah, proses *end to end* digitalisasi, meningkatkan manajemen data dan analitik, transformasi *platform* teknologi agar lebih fleksibel/luwes serta mengatasi kejahatan perbankan finansial, (King, 2020). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk bertransformasi atau migrasi menuju penerapan digitalisasi terdapat point-point ataupun langkah-langkah matang yang harus dipersiapkan agar tujuan digitalisasi tersebut mampu dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Langkah mengenai penerapan SIM terdigitalisasi ini juga disampaikan oleh Made Maharta Wijaya, Komisariss BPR KAS Indonesia sebagai berikut:

“Langkah awal yang dapat dilakukan sebelum memutuskan untuk melakukan migrasi ke penerapan SIM terdigitalisasi yaitu pertama berkaitan dengan kesiapan dari BPR dengan melihat kondisi keuangan BPR dan rasio tingkat kesehatan BPR yang dapat kita lihat melalui laporan publikasi keuangan dilaman *website* OJK. Hal tersebut merupakan modal awal untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Kedua yaitu mempersiapkan SDM yang inovatif dan mumpuni serta memahami IT sebagai pondasi untuk menuju ke arah digitalisasi. Ketiga yaitu menyiapkan segala sarana dan prasarana yang mendukung baik dari segi alat-alat teknologinya, alat-alat untuk pengembangannya serta rencana aplikasi yang akan dibuat serta sistem pengamanannya harus dirancang dari awal sebagai persiapan menuju digitalisasi. Dari ketiga komponen itu, BPR KAS Indonesia dapat saya katakan sudah memenuhi kriteria tersebut dan secara *overall* sudah siap untuk menuju ke arah penerapan digitalisasi yang lebih maksimal lagi”.

BPR KAS Indonesia meskipun saat ini belum menerapkan SIM terdigitalisasi secara maksimal, tetapi manajemen terus mendorong seluruh timnya agar tetap memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah ataupun calon nasabah yang tidak lain merupakan bagian dari *service excellent*. BPR KAS Indonesia sebagai salah satu BPR yang mengadopsi trend *milenial* ke depannya terus mendukung kegiatan operasionalnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada agar terus mampu berkembang dan mempertahankan

daya saing bisnisnya dengan sesama industri BPR yang ada di provinsi Bali. Pendapat lain mengenai langkah-langkah menuju penerapan SIM terdigitalisasi maksimal disampaikan juga oleh Kadek Darma Susila selaku *Head Risk* BPR KAS Indonesia sebagai berikut:

“Dalam memutuskan untuk melakukan penerapan SIM terdigitalisasi secara maksimal, ada langkah-langkah yang harus dipersiapkan secara matang, salah satunya yaitu dengan membuat analisa SWOT BPR. Dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan yang dihadapi oleh BPR, maka secara tidak langsung kita akan mampu mengetahui hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan untuk menuju proses digitalisasi tersebut. Digitalisasi yang dianggap sebagai tantangan bagi BPR bisa berubah menjadi peluang besar bagi BPR apabila mampu melihat celah yang bisa dimanfaatkan oleh BPR. Celah inilah yang saat ini dimanfaatkan oleh BPR KAS Indonesia sebagai peluang untuk lebih mengembangkan bisnisnya terutama yang berkaitan dengan teknologi dan digitalisasi tanpa harus melanggar aturan regulasi yang berlaku dari OJK”.

Penerapan Analisa SWOT terhadap implementasi teknologi finansial perbankan dapat meningkatkan efektivitas yang baik bagi perusahaan dan dapat meningkatkan kualitas layanan perbankan yang ada di Indonesia serta bermanfaat bagi manajemen perbankan dalam pengambilan keputusan guna dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia, (Chrismastianto, 2017). Secara garis besar, berdasarkan dari data hasil wawancara narasumber dapat dirangkum langkah-langkah atau prosedur yang harus diperhatikan apabila menuju penerapan SIM terdigitalisasi pada PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia yaitu pertama manajemen/pimpinan harus memiliki *mindset* digital, menentukan dan menetapkan peta *blueprint* digitalisasi, melakukan analisa SWOT, melakukan persiapan penyampaian informasi dan edukasi kepada nasabah serta tahap pengambilan keputusan.

Implikasi dan Dampak SIM Terdigitalisasi terhadap Eksistensi PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia

Perkembangan proses digitalisasi termasuk digitalisasi layanan perbankan melewati beberapa fase yang diawali dengan fase *deception*, fase *disruption*, fase *dematerialisation*, fase *demonetization*, dan fase *democratization*, (Hie, 2021). Fase *deception* merupakan fase dimana produk digital yang ada dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena sistemnya dianggap rumit.

Semakin berkembangnya teknologi digitalisasi perbankan akan semakin mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Verry Nusantara yang merupakan salah satu nasabah dari PT. BPR KAS Indonesia sebagai berikut:

“Penggunaan teknologi digitalisasi yang ada di bank BPR KAS saat ini sangat membantu saya dalam bertransaksi. Pembukaan rekening sudah bisa dilakukan *online* melalui bantuan marketing KAS cukup melalui *WhatsApp*. Saya sebagai nasabah tidak harus datang ke kantor untuk melakukan penyetoran ataupun penarikan dana saya yang ada di bank, karena semuanya bisa dibantu oleh pihak bank. Sayangnya transaksi belum bisa dilakukan secara mandiri dengan handphone saya (belum terhubung secara *mobile banking*) sehingga prosesnya tetap melalui bantuan pihak bank ya. Tapi biarpun begitu, BPR KAS tetap mampu memberikan pelayanan maksimalnya saat saya akan melakukan transaksi keuangan. Saya berharap ke depan BPR KAS bisa cepat

merealisasikan aplikasi *mobile* nya agar bisa semakin memberikan pelayanan yang optimal”.

Pendapat senada tentang kemudahan transaksi pada bank yang melakukan penerapan digitalisasi pada pelayanannya juga disampaikan oleh Dita Kurnia dan Tari Adnyani yang juga merupakan nasabah BPR KAS Indonesia sebagai berikut:

“Pelayanan dari BPR KAS Indonesia saat ini sudah sangat membantu dalam transaksi keuangan dan bisa dilayani dengan mudah dan cepat. Setoran atau pembayaran kredit bisa dilakukan via transfer ke rekening bank yang bekerjasama dengan BPR KAS Indonesia kemudian bukti transfer tinggal dikirim, transaksi sudah langsung diproses bank. Penarikan tunai langsung ke bank tinggal konfirmasi juga ke marketing, nanti sampai di bank tinggal tanda tangan dan ambil uang, jadi gak lama antre. Kalo penarikan mau ditransfer juga bisa, tinggal telephone marketing nanti dibantu transfer dan kita akan dikirimkan bukti transfernnya jika sudah sukses. Tinggal chat saja petugas bank nya, semua bisa dibantu. Semoga BPR KAS Indonesia tetap eksis, semakin bisa memberikan pelayanan yang prima dan tentunya ke depan bisa kami akses langsung melalui *mobile*”.

Keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan oleh perbankan yang menerapkan SIM terdigitalisasi tentunya selalu menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat yang menjadi penggunanya. Digitalisasi perbankan tentunya juga akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan nasabah karena berkaitan dengan resiko dan tingkat keamanan dari transaksi yang mereka lakukan. Sehingga penting bagi bank untuk selalu menjaga tingkat keamanan transaksi nasabah. Pendapat mengenai keraguan keamanan transaksi perbankan digital ini juga disampaikan oleh salah satu nasabah BPR KAS Indonesia Putu Mandiada sebagai berikut:

“Bagi saya transaksi yang serba *online* memang memberikan kemudahan, tetapi kadang menimbulkan keraguan. Saya takut nanti transferan saya gagal dan tidak masuk rekening, apalagi saya tinggal di tempat yang sinyal (koneksi internet) tidak begitu bagus. Jadi saya lebih memilih datang langsung ke kantor BPR KAS untuk melakukan penyetoran pembayaran kredit saya agar lebih aman dan tenang atau nanti saya titip ke marketing uangnya. Ini bukan berarti saya menolak adanya teknologi, tetapi saya lebih merasa nyaman dan percaya ketika bisa bertemu langsung dengan petugas bank nya”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat kita ketahui jika penerapan SIM terdigitalisasi pada perbankan berimplikasi pada perubahan pola transaksi nasabah yang akan berdampak pada tingkat kepercayaan dan rasa aman nasabah. Sehingga penting bagi BPR KAS Indonesia untuk tetap menjaga tingkat kepercayaan nasabah apabila akan menerapkan SIM terdigitalisasi secara maksimal agar tidak terjadi *trust issue* di masyarakat yang dapat mengganggu eksistensi BPR KAS Indonesia. Di sisi lain perkembangan teknologi digitalisasi yang semakin pesat dan adanya tuntutan serba digital oleh generasi milenial menuntut industri perbankan untuk menyederhanakan layanannya, sehingga dapat memberikan kemudahan transaksi, kecepatan dan yang paling penting dapat dilakukan dimana saja serta kapan saja, (Salmah & Murti, 2020).

Digitalisasi mendorong adanya perubahan dan membutuhkan pemahaman dalam proses penerapannya, hal ini sependapat dengan yang disampaikan Kadek Darma Susila, *Head Risk* BPR KAS Indonesia tentang terjadinya perubahan model bisnis karena adanya digitalisasi sebagai berikut:

“Perkembangan digitalisasi berimplikasi untuk mendorong adanya perubahan dalam bisnis, ada perubahan yang bersifat menyeluruh, tetapi ada juga yang sifatnya mengkolaborasikan sistem yang sudah ada dengan sistem baru yang terdigitalisasi. Bagi manajemen perusahaan khususnya pada PT. BPR KAS Indonesia ada yang menjadi catatan penerapan digitalisasi yaitu digitalisasi model apa yang akan diterapkan agar proses dan hasilnya menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Bagi saya penting sekali fokus pada apa tujuan dari penerapan SIM terdigitalisasi agar semua pihak yang terlibat mampu berkontribusi maksimal, sebab transformasi digital membutuhkan dukungan dari semua lini bisnis dan tidak semata merupakan kepentingan manajemen saja. Sehingga penerapan digitalisasi ini juga akan berdampak pada kesiapan seluruh SDM yang ada dalam perusahaan”.

Implikasi dan dampak penerapan kombinasi sistem konvensional dengan penerapan SIM terdigitalisasi yang diterapkan BPR KAS Indonesia saat ini tidak hanya dirasakan oleh nasabah, tetapi juga dirasakan oleh pihak internal perusahaan. Adanya penerapan SIM terdigitalisasi ini berdampak pada kinerja dari bagian operasional yang menjadi lebih cepat, efektif dan efisien serta bermanfaat bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

Adanya perkembangan SIM terdigitalisasi berimplikasi pada munculnya layanan *financial technology (fintech)*. Layanan ini menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi industri BPR termasuk bagi BPR KAS Indonesia. Adanya layanan *fintech* menuntut industri BPR termasuk BPR KAS Indonesia untuk terus berinovasi agar tetap bisa memenangkan persaingan bisnis, menjaga keberlanjutan usaha yang berujung pada eksistensi BPR. *Fintech* bukan ancaman bagi BPR, melainkan bisa menjadi peluang untuk melakukan kolaborasi untuk perbankan digital.

Simpulan dan Saran

PT. BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia, yang dikenal dengan nama BPR KAS Indonesia, adalah lembaga perbankan mikro yang beroperasi di Bali. Saat ini, perusahaan ini telah mengadopsi sistem core banking dan sedang mengembangkan penerapan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis digital. Namun, terdapat beberapa alasan mengapa BPR KAS Indonesia belum dapat mengimplementasikan SIM secara optimal. Pertama, adanya regulasi dari OJK seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti. Kedua, tidak semua nasabah BPR KAS Indonesia merupakan generasi milenial yang cenderung menginginkan layanan digital. Ketiga, penerapan layanan digital memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai serta dukungan dari seluruh bagian organisasi. Keempat, saat ini BPR KAS Indonesia lebih memilih untuk fokus pada pemulihan kesehatan keuangan dan kinerja setelah pandemi Covid-19. Kelima, pertimbangan biaya investasi yang diperlukan untuk penerapan SIM digital yang maksimal.

Ada perkembangan teknologi digitalisasi dalam sektor perbankan tentunya memberikan implikasi dan dampak terhadap eksistensi suatu bisnis. Implikasi dan dampak adanya SIM terdigitalisasi ini juga dirasakan oleh BPR KAS Indonesia. Adapun implikasi dan dampak tersebut sebagai berikut, (1) Adanya perkembangan SIM terdigitalisasi berimplikasi pada cara nasabah ataupun calon nasabah dalam bertransaksi keuangan di BPR KAS Indonesia, (2) Penerapan SIM terdigitalisasi memberikan kemudahan bagi manajemen BPR KAS Indonesia dalam pengambilan keputusan karena data-data yang dibutuhkan dapat langsung diakses oleh manajemen, (3) Penerapan SIM terdigitalisasi berimplikasi pada proses operasional BPR KAS Indonesia dan pada proses penyimpanan serta pencarian arsip-arsip perusahaan, (4) Penerapan SIM terdigitalisasi juga berimplikasi pada perubahan pola pikir, cara kerja dan model bisnis pada BPR KAS Indonesia (5) Adanya digitalisasi perbankan berimplikasi pada menjamurnya perusahaan *financial technology (fintech)*.

Daftar Rujukan

- Al Bahra, L. Bin. (2012). *Rekayasa perangkat lunak*. Graha Ilmu.
- Anggadini, S. D. (2020). Analisis sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam proses pengambilan keputusan. *Majalah Ilmiah Unikom*, 11(2), 176–187. <https://doi.org/10.36342/teika.v8i2.2327>
- Asaniyah, N. (2017). Pelestarian informasi koleksi langka: Digitalisasi, restorasi, fumigasi. *Buletin Perpustakaan*, 57, 85–94.
- Atmadja, A. T. (2011). Penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern lembaga perkreditan desa (LPD): Studi kasus pada LPD Desa Pakraman Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 1(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v1i1.312>
- Budisantoso, T., & Triandaru, S. (2006). *Bank dan lembaga keuangan lain* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat.
- Carvalho, N., Chaim, O., Cazarini, E., & Gerolamo, M. (2018). Manufacturing in the Fourth Industrial Revolution: A positive prospect in sustainable manufacturing. *Procedia Manufacturing*, 21, 671–678. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.02.170>
- Christmastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 133–144. <https://core.ac.uk/download/pdf/190864220.pdf>
- Davis, G. (2013). *Kerangka dasar sistem informasi manajemen*. Maxikom.
- Deegan, M., & Tanner, S. (2002). *Digital futures: Strategies for the information age*. Library Association Publishing.
- Diena, F. (2019). *Revolusi industri keempat* (A. Tarigan, Ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Galazova, S. S., & Magomaeva, L. R. (2019). The transformation of traditional banking activity in digital. *International Journal of Economics and Business Administration*, 7(2), 41–51. <https://doi.org/10.35808/ijeba/369>
- Golden, A. R. (2017). An overview of digitization in Indian banking sector. *Indo-Iranian Journal of Scientific Research (IIJSR)*, 1(1), 209–212. <http://iijsr.com/data/uploads/1025.pdf>
- Hamdan, H. (2018). Industri 4.0: Pengaruh revolusi industri pada kewirausahaan demi kemandirian ekonomi. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v3i2.12142>
- Harahap, N. J. (2019). Mahasiswa dan revolusi industri 4.0. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 6(1), 70–78. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v6i1.38>
- Hie, B. P. (2021). *Panduan transformasi digital bank di Indonesia: Konsep dan praktek dalam memimpin transformasi total* (R. Satria, Ed.; Cetakan I). Media Nusa Creative. <https://www.indonesiadigitalbank.id/book.php>
- Husein, M. F., & Wibowo, A. (2003). *Sistem informasi manajemen*. UPP AMP YKPN.

- Karnawati, D. (2017). Revolusi industri 4.0. <http://marketeers.com/mengenal-marketing-4-0-dalam-konteks-ekonomi-digital>
- Kasmir. (2018). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi ke-19). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kholis, N. (2018). Perbankan dalam era baru digital. *Economicus*, 12(1), 80–88. <https://doi.org/10.47860/economicus.v12i1.149>
- King, B. (2020). *Bank 4.0: Perbankan di mana saja dan kapan saja, tidak perlu di bank* (I. Grantika, Ed.). Jakarta Selatan: Mahaka Publishing (Imprint Republik Penerbit).
- Kristanto, A. (2013). *Perancangan sistem informasi dan aplikasinya*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Lusaya, S., & Kalumba, B. (2018). The challenges of adopting the use of e-banking to the customers: The case of Kasama District banking customers. *Scholar Journal of Applied Sciences and Research*, 1(2), 26–31. https://www.academia.edu/download/59952539/EBANKING_SJASR-2-11520190707-19636-laftdy.pdf
- McLeod, R., & Schell, G. (2004). *Sistem informasi manajemen* (H. Teguh, Ed.). Jakarta: Indeks.
- McLeod, R., & Schell, G. (2011). *Sistem informasi manajemen* (Edisi ke-9). Jakarta: Indeks.
- Mukhtar, M. (2015). *Journal of Internet Banking and Commerce*, 20(1), 1–38.
- Mustofa. (2020). Digitalisasi koleksi karya sastra Balai Pustaka sebagai upaya pelayanan di era digital natives. *JPUA: Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi Dan Komunikasi Kepustakawanan*, 8(2), 60. <https://doi.org/10.20473/jpua.v8i2.2018.60-67>
- Mutiasari, A. I. (2020). Perkembangan industri perbankan di era digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(2), 32–41. <https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541>
- Nabila, M. (2022). Membaca arah startup akuisisi BPR (Bagian II). *DailySocial*. <https://dailysocial.id/post/membaca-arrah-startup-akuisisi-bpr-bagian-ii>
- Nabilah, P., Mhd, Y., & Nurbaiti. (2021). Revolusi industri 4.0: Peran teknologi dalam eksistensi penguasaan bisnis dan implementasinya. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis (JPSB)*, 9(2), 91–98.
- Nasution, W. R. H., Nasution, M. I. P., & Sundari, S. S. A. (2022). 9 pendapat ahli mengenai sistem informasi manajemen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(4), 5893–5996.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nisaputra, R. (2022). Trend fintech akuisisi BPR: OJK tekankan jaga sustainability BPR. *Infobanknews*. <https://infobanknews.com/>
- Offei, M. O., & Nuamah-Gyambrah, K. (2016). The contribution of electronic banking to customer satisfaction: A case of GCB Bank Limited - Koforidua. *International Journal of Managing Information Technology*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.5121/ijmit.2016.8101>

- Paoki, R. (2012). Peran sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi. *Jurnal Ilmiah Unklab*, 16, 78–85.
- Rangkuti, F. (2006). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rigawan, G., & Afriyeni, A. (2019). Penerapan sistem informasi bank pada PT. Bank Central Asia Tbk (BCA). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1–9.
- Risna Kartika. (2020). Analisis peer to peer lending di Indonesia. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 12(2), 75–86.
<https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v12i2.902>
- Robbins, S. P., Bergman, R., Stagg, I., & Coulter, M. (2014). *Management*. Pearson Australia.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.